

LAPORAN KINERJA 2017



BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Prov. Kaltim*



B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mencapai tujuan diperlukan sebuah perencanaan yang matang dan terukur. Secara konseptual perencanaan organisasi pemerintahan dituangkan pada sebuah dokumen yang sering disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis-SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja-SKPD.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 menyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Lebih lanjut dalam dokumen perencanaan tersebut ditegaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur merancang rencana strategik secara bersama-sama antara pimpinan dengan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Tanpa mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lain, maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan berkomitmen untuk tetap berpegang pada aturan main sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2013-2018.



B. Dasar Hukum.

Secara teknis, tugas pokok-fungsi dan program/kegiatan Bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan Tahun 2017 dilaksanakan atas dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan.
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pendampinga Desa.
- i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendirian BUMDes.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2015 tentang Penyusunan Perdes
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pendirian Program Pembangunan Kawasan Perdesaan



- m. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- n. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- o. Rencana Strategis DPMPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

C. Aspek Strategis Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Aspek strategis Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan meliputi :

- a. Pembangunan Desa,
- b. Pembangunan Kawasan Perdesaan,
- c. Pengembangan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok :

F u n g s i :

- a.
- b.

E. Struktur Organisasi

Secara struktural Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.



F. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan didukung oleh orang pegawai yang terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil Provinsi : 8 Orang
- b. Pegawai Negeri Sipil Pusat (Titipan) : - Orang
- c. Tenaga Kontrak : 5 Orang

Rincian Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) :

- a. Menurut pangkat / golongan :
 - 1). Pembina / IV a = 2 Orang
 - 2). Penata Tingkat I / III d = 2 Orang
 - 3). Penata Muda Tk. I/III b = 2 Orang
 - 4). Penata Muda /III a = 1 Orang
 - 4). Pengatur Tk.I / II d = 1 Orang
- b. Menurut pendidikan
 - 1). S – 2 = 3 Orang
 - 2). S – 1 = 2 Orang
 - 3). S L T A = 3 Orang

G. Sarana dan Prasarana Kerja

Untuk menunjang kelancaran tugas, Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang berupa :

- a. Meja Eselon III sebanyak 1 (satu) unit.
- b. Meja Eselon IV sebanyak 3 (tiga) unit
- c. Meja Staf sebanyak 10 unit.
- d. Kursi Eselon III sebanyak 1 (satu) unit
- e. Kursi Eselon IV sebanyak 3 (tiga) unit.
- f. Kursi Staf sebanyak 10 unit.
- g. Komputer sebanyak 6 (enam) unit.
- h. Laptop sebanyak 3 (tiga) unit.
- i. Mesin Tik manual sebanyak 2 (dua) unit.
- j. Printer sebanyak 5 (lima) unit.



B A B II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2017

Untuk mendukung Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2013-2018 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kalimantan Timur yang Mandiri dan Sejahtera”, Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan menetapkan rencana kerja tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 1

Rencana Kerja Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
Tahun 2017

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun 2017	Program /Kegiatan	Pagu Dana (Rp.)
Tersedianya Informasi Desa meliputi Data Desa, Data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan serta informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah Data Informasi Pembangunan Desa/Kelurahan	4 Sistem Informasi	Program Pembangunan Desa dan Kawasan 1. Pengembangan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan	Rp. 174.842.000
Pengurangan Desa Tertinggal dan Peningkatan Desa Berkembang	Jumlah Kabupaten yang dibina Jumlah Pendamping Desa yang dibina	5 Kabupaten 50 Orang		



Peningkatan Keterkaitan Desa dan Ekonomi Kawasan Perdesaan untuk Percepatan Desa Mandiri	Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Kali		
--	---	--------	--	--



B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Utama.

Capaian indikator kinerja utama diukur melalui hasil output dan outcome atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Penjelasan atas capaian indikator kinerja utama Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Tahun 2017 sebagaimana tersebut pada tabel 2 seperti berikut ini :

Tabel 2

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
1.	Tersedianya Informasi Desa meliputi Data Desa, Data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan serta informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan				
	Jumlah Data Informasi Pembangunan Desa/Kelurahan	4 Sistem Informasi	4	4	100
2.	Pengurangan Desa Tertinggal dan Peningkatan Desa Berkembang				100
	Jumlah Kabupaten yang dibina	5 Kabupaten	5	5	
	Jumlah Pendamping Desa yang dibina	50 orang	50	200	400



3	Peningkatan Keterkaitan Desa dan Ekonomi Kawasan Perdesaan untuk Percepatan Desa Mandiri	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100
	Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Target dan Realisasi

Untuk mengetahui hasil capaian kinerja Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan dilakukan melalui perbandingan antara realisasi capaian kinerja dengan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2017.

Hasil kinerja Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan dapat dilihat melalui tabel 3 berikut ini :

Tabel 3

CAPAIAN KINERJA BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN TAHUN 2017

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra 2013 s/d 2018	Realisasi Tahun 2017			Realisasi Tahun 2017
		Target	Realisasi	% Capaian	
Tersedianya Informasi Desa meliputi Data Desa, Data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan serta informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Jumlah Data Informasi Pembangunan		4	4	100	100 %



Desa/Kelurahan					
Pengurangan Desa dan Peningkatan Desa Berkembang.		5	5	100	100 %
Jumlah Kabupaten yang dibina		50	200	400	400 %
Jumlah Pendamping Desa yang dibina					
Peningkatan Keterkaitan Desa dan Ekonomi Kawasan Perdesaan untuk Percepatan Desa Mandiri Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		1	1	100	100 %

Capaian indikator utama terkait dengan Program Pembangunan Desa dan Kawasan, kegiatan pengembangan informasi pembangunan desa dan kelurahan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah Data Informasi Pembangunan Desa/Kelurahan dari target 4 sistem informasi, realisasinya tercapai 4 sistem informasi, sehingga capaian pada akhir kegiatan 100 persen.
2. Jumlah Kabupaten yang dibina dari target 5 Kabupaten, realisasinya tercapai 5 Kabupaten, sehingga capaian pada akhir kegiatan sebesar 100 persen.
3. Jumlah pendamping desa yang berhasil dibina pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dari target 50 orang, realisasinya sebanyak 397 orang, sehingga capaian pada akhir kegiatan adalah 800 persen.
4. Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dari target 1 Kali, realisasinya 1 Kali, sehingga capaian pada akhir kegiatan adalah 100 persen.



Pada tabel 3 tersebut diatas menggambarkan bahwa target dan realisasi pada haketatnya menunjukkan hasil sasaran yang akan dicapai bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan pada tahun anggaran 2017 adalah **Tersedianya Informasi Desa meliputi Data Desa, Data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan serta informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan**, dengan indikator Jumlah Data Informasi Pembangunan Desa/Kelurahan 4 (empat) sistem informasi antara lain : 1. Data Pembangunan Desa, 2. Data Pembangunan Kawasan Perdesaan, 3. Data Profile Desa/Kelurahan, 4. Data Desa/Kelurahan Blank Spot **Pengurangan Desa Tertinggal dan Peningkatan Desa Berkembang**, dengan indikator Jumlah Kabupaten yang dibina 5 Kabupaten, Jumlah Pendamping Desa yang dibina 50 orang, **Peningkatan Keterkaitan Desa dan Ekonomi Kawasan Perdesaan untuk Percepatan Desa Mandiri**, dengan indikator Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 Kali, Untuk mencapai target-target tersebut dilakukan melalui Program Pengembangan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan.

Berikut capaian indikator Data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan Serta Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 :

Tabel 4
Data Pembangunan Desa
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	JUMLAH KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
1	PASER	10	139	871
2	KUTAI KARTANEGARA	16	193	1501
3	BERAU	12	100	457
4	KUTAI BARAT	16	190	585
5	KUTAI TIMUR	18	139	1575
6	PENAJAM PASER UTARA	4	30	173
7	MAHAKAM ULU	5	50	298
JUMLAH PROVINSI		81	841	5460



Tabel 5
Data Pembangunan Sarana Olah Raga
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

NO	KABUPATEN	JUMLAH KEC	JUMLAH DESA	JUMLAH SORGA DESA	VOLUME	BIAYA Rp.
1	PASER	10	139	11	7024	581.706.843
2	KUTAI KARTANEGARA	16	193	5	120	-
3	BERAU	12	100	27	1112	3.015.714.381
4	KUTAI BARAT	16	190	23	1071	4.530.714.250
5	KUTAI TIMUR	18	139	24	1	2.379.457.000
6	PENAJAM PASER UTARA	4	30	0	0	-
7	MAHAKAM ULU	5	50	23	5396,446	2.522.460.394
JUMLAH		81	841	113	14724,446	13.030.052.868

Tabel 6
Data Pengelolaan EMBUNG DESA
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

NO	KABUPATEN	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH EMBUNG DESA	LUAS M2	BIAYA Rp.
1	PASER	10	139	2	3.300	528.632.000
2	KUTAI KARTANEGARA	16	193	1	24	29.039.400
3	BERAU	12	100	0	-	-
4	KUTAI BARAT	16	190	1	-	22.400.000
5	KUTAI TIMUR	18	139	6	1.714	282.917.500
6	PENAJAM PASER UTARA	4	30	0	-	33.357.000
7	MAHAKAM ULU	5	50	0	-	-
JUMLAH		81	841	10	5.038	896.345.900



Tabel 7
DATA PASAR DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PRIODE 2015 – 2017

NO	KABUPATEN	Σ KEC	Σ DESA	TAHUN			STATUS	
				2015	2016	2017	HARIAN	MINGGUAN
1	PASER	10	139	68	75	75	2	70
2	KUTAI KARTANEGARA	18	193	60	62	62	4	55
3	BERAU	12	100	5	5	5	5	0
4	KUTAI BARAT	16	190	28	28	29	4	25
5	KUTAI TIMUR	18	139	9	9	24	2	22
6	PENAJAM PASER UTARA	4	30	9	11	11	2	9
7	MAHAKAM ULU	5	50	11	11	11	2	9
JUMLAH		83	841	190	201	217	21	190

Tabel 8
Data Pembangunan Desa Bidang Pelayanan Sosial Dasar
(Pendidikan dan Kesehatan)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

NO	KABUPATEN	KEC	DESA	JUMLAH KEGIATAN PEMBANGUNAN PSD	
				PENDIDIKAN	KESEHATAN
1	PASER	10	139	45	60
2	KUTAI KARTANEGARA	16	193	99	111
3	BERAU	12	100	35	62
4	KUTAI BARAT	16	190	108	83
5	KUTAI TIMUR	18	139	71	60
6	PENAJAM PASER UTARA	4	30	5	10
7	MAHAKAM ULU	5	50	22	28
JUMLAH PROVINSI		81	841	385	414



Tabel 9

Data Profile Desa dan Kelurahan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Dalam Tahap Penginputan Data ke Sistem Aplikasi Prodeskel

NO	KABUPATEN.KOTA	KEC	DESA	KEL	PROGRES PEKERJAAN (%) 2017
1	PASER	10	139	45	82,6
2	KUTAI KARTANEGARA	16	193	99	75
3	BERAU	12	100	110	100
4	KUTAI BARAT	16	190	23	12
5	KUTAI TIMUR	18	139	133	94,3
6	PENAJAM PASER UTARA	4	30	54	100
7	MAHAKAM ULU	5	50	4	4
8	Samarinda	10		19	32,2
9	Balikpapan	6		31	91
10	Bontang	3		14	93

Tabel 10

Data Target Penyelesaian Profile Desa dan Kelurahan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Data per bulan Desember 2017

NO	KABUPATEN/ KOTA	PRODESKEL			KET
		SUDAH INPUT	PROSES	BELUM INPUT	
1.	Samarinda	19	0	40	
2.	Balikpapan	34	0	0	
3.	Bontang	14	0	1	
4.	Berau	110	0	0	
5.	Kutai Kartanegara	178	0	59	
6.	Kutai Barat	23	0	171	
7.	Kutai Timur	133	0	8	
8.	Penajam Pasertara	54	0	0	
9.	Paser	114	0	35	
10.	Mahakam Ulu	4	0	46	



Tabel 11
Data Desa/Kelurahan Yang belum mendapatkan Jaringan (Blank Spot)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

NO	KABUPATEN/KOTA	KEC	DESA	KEL	Data Blankspot	
					DESA	KEL
1	PASER	10	139	45	67	0
2	KUTAI KARTANEGARA	16	193	99	55	0
3	BERAU	12	100	110	25	0
4	KUTAI BARAT	16	190	23	67	0
5	KUTAI TIMUR	18	139	133	34	1
6	PENAJAM PASERTARA	4	30	54	19	10
7	MAHAKAM ULU	5	50	4	31	0
8	Samarinda	10		19	0	1
9	Balikpapan	6		31	0	0
10	Bontang	3		14	0	2



Tabel 12
Daftar Alokasi Dan Lokasi Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi
Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017

NO	KABUPATEN	JML KEC.	JML DESA	ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017	ALOKASI DANA DESA DARI RKUN KE RKUD	%	ALOKASI DANA DESA TRANSFER DARI RKUD KE RKD	%
					TAHAP I & II		TAHAP I & II	
1	PASER	10	139	110.045.744.000	110.045.744.000	100%	103.470.783.600	94%
2	KUTAI KARTANEGARA	4	30	154.651.907.000	154.651.907.000	100%	151.165.535.835	98%
3	BERAU	16	193	84.106.487.000	84.106.487.000	100%	82.956.295.150	99%
4	KUTAI BARAT	16	190	149.709.702.000	149.709.702.000	100%	149.709.702.000	100%
5	KUTAI TIMUR	18	139	119.762.483.000	119.762.483.000	100%	117.650.934.032	98%
6	PPU	12	100	27.736.025.000	27.736.025.000	100%	27.736.025.000	100%
7	MAHAKAM ULU	5	50	46.407.899.000	46.407.897.000	100%	45.403.985.200	98%
JUMLAH		81	841	692.420.247.000	692.420.245.000	100%	678.093.260.817	98%
PROGRES				100%				



Tabel 13
Daftar Capaian Realiasi Anggaran Dana Desa
Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017

NO	KABUPATEN	JML KEC.	JML DESA	ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017	JML DESA CAIR DD TAHAP		JUMLAH PENGGUNAAN DD TAHAP I & II
					I	II	
1	PASER	10	139	110.045.744.000	137	121	46.283.598.327
2	KUTAI KARTANEGARA	4	30	154.651.907.000	190	185	83.174.143.103
3	BERAU	16	193	84.106.487.000	98	98	40.813.648.583
4	KUTAI BARAT	16	190	149.709.702.000	190	190	57.823.783.832
5	KUTAI TIMUR	18	139	119.762.483.000	139	133	13.338.273.824
6	PPU	12	100	27.736.025.000	30	30	23.343.982.145
7	MAHAKAM ULU	5	50	46.407.899.000	49	49	36.500.663.371
JUMLAH		81	841	692.420.247.000	833	806	301.278.093.184



Tabel 14
Rekapitulasi Jumlah Pendamping
Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017

No	Kabupaten	Kec	Desa	TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL (TPP)				Total Kabupaten
				TENAGA AHLI	PENDAMPING DESA	PENDAMPING DESA TI	PENDAMPING LOKAL DESA	
1	BERAU	12	100	6	12	7	18	43
2	KUTAI KARTANEGARA	16	193	6	26	15	52	99
3	PENAJAM PASER UT	4	30	4	6	4	8	22
4	KUTAI BARAT	16	190	6	21	11	39	77
5	PASER	10	139	6	17	10	36	69
6	MAHAKAM ULU	5	50	4	7	2	5	18
7	KUTAI TIMUR	18	139	5	19	11	34	69
	TOTAL	81	841	37	108	60	192	397



Tabel 15
Lokasi Sasaran Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Kabupaten Kutai Kartanegara
Kecamatan Tenggarong Seberang

No	Desa	Luas (Km2)	(%)
1	Bukit Pariaman	82,2	35,3
2	Kerta Buana	39,5	17
3	Bangunrejo	36,3	15,6
4	Embalut	26,9	11,5
5	Manunggal Jaya	15,5	6,7
6	Karang Tunggal	8,4	3,6
7	Bukit Raya	12,3	5,3
8	Perjiwa	11,6	5
Jumlah		232,7	100%



Data Pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

POTENSI KAWASAN

No	Klaster
1	Pertanian
	1) Padi Sawah (Utama)
	2) Jagung
	3) Kacang-kacangan
	4) Ubi-ubian
	5) Sayuran (Terong, Tomat)
	6) Buah-buahan (Durian)
2	Peternakan
	1) Sapi
	2) Kambing
	3) Unggas (Ayam)
3	Perikanan
	1) Lele
	2) Mas
	3) Nila
	4) Bawal
4	Pendukung
	1) BUMDes
	2) KUD
	3) Pasar
	4) Infrastruktur Jalan
	5) Masyarakat dan Gapoktan



**Potret
Komoditas
Utama dan
Pendukung
pada
Kawasan
Perdesaan**





TIGA (3) KOMODITY UNGGULAN KAWASAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017



PERTANIAN (SAWAH)



PERIKANAN (IKAN TAWAR)



PETERNAKAN SAPI

PENGEMBANGAN KAWASAN AGRO MINA PASTORAL



HASIL CAPAIAN KINERJA BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

1. Tersusunnya Data Informasi Tentang Hasil Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017
2. Tersampainya Informasi tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan melalui Media Website, Cetak dan Elektronik.
3. Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi di 5 Kabupaten Lokasi Program P3MD dalam melakukan Koordinasi mengenai keberadaan Pendamping Program serta memberikan penguatan kepada 50 Pendamping Desa .
4. Terlaksanakannya Sosialisasi P2KPD serta Monev dan pembinaan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, terdapat beberapa faktor penghambat atau permasalahan, Adapun Faktor-faktor tersebut antara lain adalah :

1. Diwilayah Pembangunan Kawasan Perdesaan, pembangunan sarana-prasarana belum memadai dalam membantu pelaksanaan Program Kawasan
2. Status kepemilikan lahan Ex tambang belum jelas
3. Sinkronisasi OPD dan Perusahaan terkait status lahan belum maksimal
4. Penerbitan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi setiap tahunnya selalu mengalami keterlambatan, sehingga menghambat Satker dalam melaksanakan kegiatan.
5. Sering terjadinya Revisi DIPA hingga sampai 5 Kali selama 1 Tahun, hal ini menyebabkan menghambat pelaksanaan kegiatan di Satker.
6. Anggaran Gaji Pendamping tidak seimbang dengan jumlah pendamping yang ada, hal ini menyebabkan progres serapan dana disatker mengalami penurunan.
7. Biaya Operasional Bagi Pendamping Desa sangatlah kecil, sementara tugas pendampingan seorang pendamping desa untuk di kalimantan timur sangatlah luas dibandingkan pendamping yang bertugas di Pulau Jawa, penyebab hal tersebut pendamping banyak yang ingin keluar dari program.
8. Peran Camat belum Optimal dalam mengawal Dana Desa.
9. Perlunya dilakukan Penguatan bagi Pendamping sesuai jenjang.
10. Masih banyak desa/kelurahan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami kesulitan jaringan internet atau blankspot dan juga pasokan



listrik yang belum stabil sehingga tidak dapat mengakses data profil desa/kelurahan secara online.

11. Operator Profil desa/kelurahan yang tidak tetap dan sering berganti seiring dengan digantinya Kepala Desa/Lurah.
12. Kondisi Topografi Provinsi Kalimantan Timur yang masih tertutup hutan dan pegunungan serta tertutup akses sungai yang cukup panjang juga banyak pulau – pulau terluar yang ada di Provinsi Kalimantan Timur ini sehingga untuk pembangunan dan pemasangan jaringan seluler masih sangat sulit untuk dilakukan.

RENCANA KERJA TINDAK LANJUT

1. Diperlukan Alokasi anggaran dari APBD Provinsi Kalimantan Timur dan APBD Kabupaten/Kota yang lebih besar untuk membuka akses jaringan menjadi suatu keharusan.
2. Mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika untuk membangun jaringan komunikasi yang lebih kecil yang terdapat di setiap Desa untuk menunjang menara telekomunikasi BTS (Base Transceiver Station) yang lebih besar.
3. Perlu memaksimalkan peran pendamping desa dalam mendampingi desa dalam pengisian data dasar profil desa/kelurahan agar diperoleh data dasar profil desa dan kelurahan dengan baik dan benar dan tingkat keakuratannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi desa/kelurahan.
4. Desa dapat menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk melakukan pelatihan profil desa/kelurahan yang dapat diusulkan di musyawarah desa, demikian juga Kabupaten/Kota dapat menganggarkan biaya pemberian insentif bagi RT untuk mendata tiap KK.
5. Kabupaten/Kota agar menginstruksikan kepada desa/kelurahan untuk melakukan penyusunan dan pemutakhiran data profil desa/kelurahan secara online tiap bulan pada tahun berjalan agar diperoleh hasil analisis data profil desa/kelurahan yang update.
6. Perlu adanya regulasi yang jelas di tiap Kabupaten/Kota untuk mengatur batas administratif desa/kelurahan sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
7. Untuk menetapkan 1 (satu) Wilayah sebagai Pembangunan Kawasan Perdesaan Pemerintah Hendaknya perlu mengkaji terlebih dahulu wilayah setempat salah satunya adalah pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang ada di wilayah tersebut.



8. Lahan Ex tambang yang akan diserahkan kepada Masyarakat, harus di selesaikan status kepemilikan lahan, agar ketika lahan akan digunakan untuk kegiatan Pembangunan Kawasan tidak terjadi tumpang tindih.
9. Dalam rangka lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa, hendaknya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten diminta untuk dapat mengalokasikan Dana Operasional (PAP) minimal 1% dari Total Dana Desa, hal ini di dilakukan untuk menunjang kegiatan - kegiatan Penguatan dan Pembinaan para pelaku Program Pembangunan Desa serta memberikan pelatihan usaha ekonomi agar kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa dapat meningkat.
10. Pemerintah Kabupaten diminta untuk segera membentuk Tim Pengendali Dana Desa dan melibatkan kepala OPD Teknis .
11. Peran Camat selaku Verifikasi Dana Desa harusnya lebih intens untuk melakukan Kunjungan ke Desa – Desa agar dapat mengetahui permasalahan yang ada di Desanya.
12. Aturan Mengenai Rekrutmen dan Penempatan Pendamping, sebaiknya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi, yang mana tujuannya adalah untuk memudahkan Satker Provinsi untuk melakukan Rekrutmen dan penempatan apabila terjadi kekosongan pendamping.



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sebagaimana telah dimandatkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

Samarinda, 12 Januari 2018

Kasi

Pembangunan Informasi
Desa/Kelurahan

Isnawati, S.P, M.Si

NIP. 19740124 199703 2 003

Kasi

Pembangunan Kawasan
Perdesaan

Drs. Dakwan Diny

NIP. 19681028 199001 010

Kasi

Pembangunan Desa

Drs. Elvis, M.Si

NIP. 19651221 198609 1 001



Galeri

Desa Berprestasi Pasar Belengkong





Gebyar Inovasi Desa





Kegiatan Ex PNPM





Kelurahan Berprestasi Bontang





Kunjungan Presiden ke Desa Tani Bhakti Kabupaten Kutai Kartanegara

